1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi Kota Pekalongan mengacu Kota Tegal sebagai kota IHK. Pada Juli 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,62 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,14. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Bulan Juli 2026 masing-masing sebesar 0,09 persen dan 1,38 persen. Pada bulan Agustus 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,59. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) bulan Agustus 2026 masing-masing sebesar 0,40 persen dan 1,79 persen. September 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,97 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,81. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Bulan September 2026 masing-masing sebesar 0,20 persen dan 1,99 persen.

2. Perkembangan harga barang

Pemantauan harga kebutuhan pokok pada Triwulan III Tahun 2026 (Juli sampai dengan September) dilakukan terhadap 42 komoditas di tiga pasar, yaitu Pasar Banjarsari, Pasar Grogolan, dan Pasar Banyurip. Harga yang dilaporkan merupakan harga rata-rata setiap bulan yang dibandingkan dengan harga rata-rata bulan sebelumnya, sehingga pergerakan harga dapat dianalisis mulai bulan Juni hingga September 2026.

Secara umum, harga kebutuhan pokok bergerak naik secara bertahap selama triwulan. Pada bulan Juli, sebanyak 12 komoditas mengalami penurunan harga, 5 komoditas mengalami kenaikan, dan 25 komoditas tidak berubah. Pada bulan Agustus, jumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga meningkat menjadi 13 komoditas, sedangkan yang mengalami penurunan menjadi 7 komoditas dan 22 komoditas tidak berubah. Pada bulan September, sebanyak 15 komoditas mengalami kenaikan harga, 5 komoditas mengalami penurunan, dan 22 komoditas tidak berubah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga yang cenderung mereda pada bulan Juli kembali menguat pada bulan Agustus dan September. Sebanyak 22 komoditas tercatat tidak mengalami perubahan harga sepanjang periode Juni hingga September 2026, antara lain beras premium, Minyakita, tahu, tempe, telur ayam kampung, daging ayam kampung, garam, ikan kembung, ikan asin teri, kedelai impor, jagung pipilan, ketela pohon, pisang ambon, jeruk lokal, mi instan, bawang putih honan, dan sebagian besar produk susu.

- Cabai

Cabai merupakan komoditas dengan fluktuasi harga paling tinggi. Pada bulan Juli 2026, harga seluruh jenis cabai turun cukup dalam dari level tinggi pada bulan Juni. Harga cabai rawit merah turun dari Rp62.530 menjadi Rp41.478 per kilogram (sekitar 33,7 persen), cabai merah keriting turun dari Rp42.470 menjadi Rp31.696 per kilogram (sekitar 25,4 persen), dan cabai merah besar atau teropong turun dari Rp41.652 menjadi Rp29.000 per kilogram (sekitar 30,4 persen). Pada bulan Agustus, harga seluruh jenis cabai kembali naik secara moderat, yaitu cabai rawit merah menjadi Rp48.018, cabai merah keriting Rp33.333, cabai merah teropong Rp31.246, dan cabai rawit hijau Rp36.316 per kilogram.
Kenaikan terbesar terjadi pada bulan September 2026. Harga cabai rawit merah naik sebesar

Rp19.602 menjadi Rp67.619 per kilogram (sekitar 40,8 persen), yang merupakan kenaikan terbesar dari seluruh komoditas yang dipantau. Harga cabai rawit hijau naik sekitar 11,0 persen menjadi Rp40.302 per kilogram dan cabai merah keriting naik sekitar 6,2 persen menjadi Rp35.413 per kilogram, sedangkan harga cabai merah teropong turun sekitar 18,0 persen menjadi Rp25.635 per kilogram. Dengan demikian, tekanan harga pada kelompok cabai terkonsentrasi pada cabai rawit, dan harga cabai rawit merah pada bulan September telah melampaui level bulan Juni sekitar 8,1 persen. Kenaikan tersebut diperkirakan berkaitan dengan berkurangnya pasokan pada musim kemarau.

- Bawang

Harga kelompok bawang bergerak berlawanan dengan cabai sehingga turut menahan tekanan harga. Harga bawang merah turun selama tiga bulan berturut-turut, dari Rp51.318 per kilogram pada bulan Juni menjadi Rp39.565 pada bulan Juli, Rp33.947 pada bulan Agustus, dan Rp32.397 pada bulan September, atau turun sekitar 36,9 persen sejak bulan Juni. Harga bawang putih kating naik sekitar 11,3 persen pada bulan Juli menjadi Rp40.928 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp40.193 pada bulan Agustus dan Rp38.127 pada bulan September, namun masih sekitar 3,7 persen di atas harga bulan Juni. Harga bawang putih honan stabil di Rp30.000 per kilogram. Harga bawang bombai turun dari Rp35.015 per kilogram pada bulan Juni menjadi Rp32.246 pada bulan Agustus, kemudian naik tipis menjadi Rp32.905 pada bulan September.

- Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, dan Tepung Terigu

Harga beras relatif terkendali. Harga beras medium (mangga) bergerak dari Rp14.530 per kilogram pada bulan Juni menjadi Rp14.500 pada bulan Juli, Rp14.746 pada bulan Agustus, dan Rp14.833 pada bulan September, atau naik sekitar 2,1 persen dibandingkan bulan Juni. Harga beras premium tidak berubah di Rp16.467 per kilogram, sehingga selisih harga dengan beras medium sekitar Rp1.600 per kilogram.

Harga gula pasir kristal putih turun dari Rp17.652 per kilogram pada bulan Juni menjadi Rp17.377 pada bulan Agustus, kemudian naik sekitar 2,8 persen menjadi Rp17.857 pada bulan September. Harga minyak goreng cenderung naik tipis pada akhir triwulan. Harga minyak curah turun menjadi Rp19.200 per liter pada bulan Agustus, kemudian naik menjadi Rp19.471 pada bulan September, sedangkan harga minyak goreng kemasan premium naik dari Rp22.000 pada bulan Juli menjadi Rp22.737 pada bulan Agustus dan Rp23.000 pada bulan September. Harga Minyakita tidak berubah di Rp17.567 per liter dan perlu dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

Harga tepung terigu cenderung turun. Tepung terigu merek Segitiga Biru (premium) turun dari Rp12.000 menjadi Rp11.333 per kilogram (sekitar 5,6 persen), tepung terigu protein sedang turun dari Rp11.333 menjadi Rp11.000 per kilogram, sedangkan tepung terigu protein rendah tidak berubah di Rp9.333 per kilogram.

- Daging, Telur, Ikan, dan Udang

Kelompok protein hewani menjadi salah satu sumber tekanan harga yang cukup konsisten. Harga daging ayam ras turun dari Rp38.333 per kilogram pada bulan Juni menjadi Rp36.652 pada bulan Juli, kemudian naik sekitar 12,8 persen menjadi Rp41.351 pada bulan Agustus dan Rp42.016 pada bulan September, atau sekitar 9,6 persen di atas harga bulan Juni. Harga telur ayam ras turun menjadi Rp24.428 per kilogram pada bulan Juli, kemudian naik menjadi Rp25.456 pada bulan Agustus dan Rp25.635 pada bulan September, dan masih sekitar 1,5

persen di bawah harga bulan Juni.
Harga daging sapi murni (has luar) naik setiap bulan sekitar 2 persen, dari Rp140.000 per kilogram pada bulan Juni menjadi Rp142.899, Rp145.632, dan Rp148.333 pada bulan September, atau naik sekitar 6,0 persen. Harga udang basah ukuran sedang juga naik selama tiga bulan berturut-turut dari Rp64.333 menjadi Rp70.667 per kilogram (sekitar 9,8 persen). Sementara itu, harga daging ayam kampung (Rp93.333), telur ayam kampung (Rp47.400), ikan laut kembung (Rp40.000), dan ikan asin teri (Rp78.333) tidak mengalami perubahan.

- Kacang-kacangan dan Komoditas Lainnya

Harga kacang tanah dan kacang hijau naik secara bertahap. Harga kacang tanah naik dari Rp28.000 per kilogram pada bulan Juni menjadi Rp28.797 pada bulan Juli, Rp33.632 pada bulan Agustus (kenaikan sekitar 16,8 persen), dan Rp34.000 pada bulan September, atau naik sekitar 21,4 persen. Harga kacang hijau naik dari Rp24.833 menjadi Rp27.667 per kilogram (sekitar 11,4 persen). Kenaikan tersebut belum diikuti oleh produk turunan kedelai, yaitu tahu dan tempe yang tetap berada pada Rp10.000 dan Rp11.000 per kilogram, dan harga kedelai impor yang tetap di Rp10.500 per kilogram. Komoditas lainnya, seperti jagung pipilan kering, ketela pohon, pisang ambon, jeruk lokal, garam, dan mi instan, tidak mengalami perubahan harga. Pada kelompok susu, hanya susu kental manis Indomilk plain yang naik tipis dari Rp12.000 menjadi Rp12.167.

Secara umum, harga kebutuhan pokok utama, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, tahu, dan tempe, relatif terkendali selama Triwulan III Tahun 2026. Tekanan harga terkonsentrasi pada cabai rawit merah, daging ayam ras, daging sapi, udang basah, dan kacang-kacangan. Terdapat empat komoditas yang harganya naik setiap bulan selama triwulan, yaitu daging sapi, udang basah, kacang tanah, dan kacang hijau. Jumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga terus bertambah hingga akhir September, sehingga harga cabai rawit merah dan daging ayam ras perlu mendapat perhatian khusus, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Terbatasnya lahan pertanian

Kota Pekalongan adalah wilayah perkotaan dengan luas yang kecil dan permukiman yang padat. Ruang untuk produksi pangan sangat terbatas, sehingga kapasitas produksi pangan lokal jauh di bawah kebutuhan konsumsi penduduk. Kondisi ini juga diperberat oleh banjir dan rob di wilayah pesisir, yang membuat sebagian lahan sulit ditanami secara optimal. Akibatnya, daerah tidak punya penyangga produksi sendiri untuk meredam gejolak harga ketika pasokan dari luar terganggu.

2. Fluktuasi harga komoditas pangan

Harga komoditas pangan, terutama hortikultura seperti cabai dan bawang, bergerak sangat cepat dan sulit diprediksi. Perubahannya bisa terjadi dalam hitungan hari, dipengaruhi cuaca, masa panen, dan kondisi distribusi. Komoditas pangan memiliki bobot besar dalam konsumsi rumah tangga. Fluktuasi ini bersifat selektif karena tidak semua komoditas naik bersamaan, sehingga pemantauan harus dilakukan terus-menerus dan terperinci per komoditas. Dampaknya paling dirasakan kelompok berpenghasilan rendah, yang sebagian besar

pengeluarannya untuk kebutuhan pangan.

3. Kota Pekalongan bukan daerah pemasok

Sebagai kota yang tidak menghasilkan sebagian besar kebutuhan pangannya sendiri, Pekalongan menjadi penerima harga (*price taker*). Harga di pasar kota dibentuk di daerah penghasil dan di sepanjang rantai distribusi, mulai dari petani, pengepul, pedagang besar, hingga pedagang eceran. Ketika pasokan di sentra produksi berkurang atau biaya angkut naik, kenaikan itu diteruskan hampir seketika ke pasar kota. Pemerintah kota tidak punya kendali langsung atas produksi maupun harga di hulu. Kewenangannya lebih banyak pada sisi hilir, seperti menjaga kelancaran distribusi, memantau pasar, dan mencegah penimbunan atau pengambilan margin yang berlebihan. Karena itu, kerja sama antardaerah dengan wilayah pemasok menjadi kunci, dan efektivitasnya bergantung pada koordinasi lintas pemerintah daerah.

4. Musim kemarau

Kemarau mengurangi produksi pertanian di daerah pemasok karena ketersediaan air menurun, pertumbuhan tanaman terganggu, dan jadwal panen bergeser. Pasokan ke pasar menipis sehingga harga naik, terutama untuk komoditas yang mudah terdampak seperti cabai dan sayuran. Tahun ini kemarau dipengaruhi fenomena iklim yang membuatnya lebih kering dan lebih panjang dari biasanya, sehingga tekanan pada pasokan lebih kuat dan berlangsung lebih lama. Bagi Pekalongan, dampaknya tidak langsung karena berasal dari daerah penghasil, tetapi pengaruhnya ke harga di pasar kota tetap nyata. Setelah kemarau, risiko bergeser ke musim hujan yang membawa ancaman banjir, gangguan distribusi, dan gagal panen, sehingga tekanan harga bisa berlanjut dengan penyebab yang berbeda.

5. Kondisi ekonomi nasional, seperti kenaikan harga BBM nonsubsidi

Inflasi daerah tidak lepas dari kondisi ekonomi nasional dan global yang berada di luar kendali pemerintah kota. Kenaikan harga energi dan melemahnya nilai tukar rupiah meningkatkan biaya produksi, bahan baku, dan transportasi, yang akhirnya diteruskan ke harga barang dan jasa. Perlu dicatat bahwa tidak semua jenis BBM mengalami kenaikan. BBM bersubsidi relatif ditahan oleh pemerintah, sedangkan sebagian BBM non subsidi disesuaikan mengikuti harga pasar. Pengaruh langsungnya ke masyarakat umum memang terbatas, tetapi tekanan biaya tetap muncul bagi sektor tertentu, termasuk pelaku usaha yang bergantung pada angkutan dan bahan baku impor, seperti industri batik dan tekstil. Risikonya meningkat bila penyesuaian harga BBM non subsidi berlanjut, karena kenaikan biaya angkut dapat memperkuat tekanan pada harga pangan yang sudah rentan. Pemerintah kota hanya bisa meredam dampaknya lewat langkah di tingkat lokal, misalnya menjaga kelancaran distribusi, mengelola ekspektasi masyarakat, dan mendukung pelaku usaha kecil.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga.

1) Sidak Pasar

Dinperpa (Dinas Pertanian dan Pangan) Kota Pekalongan bersama tim Stabilisasi Pasokan dan

Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional memantau harga kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas harga pasar.

2) Pemantauan Harian Harga Kebutuhan Pokok
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok setiap hari di pasar pantauan yaitu Pasar Banjarsari, Pasar Grogolan, dan Pasar Banyurip. Hasil pemantauan tersebut kemudian dipublikasikan di Website Sipokmas dan akun media sosial instagram Dindaggkop dan UKM Kota Pekalongan.

2. Ketersediaan Pasokan.

1) Pengujian beras Bantuan Pangan Pemerintah
Kepala Dinperpa dan tim menguji kuantitas, kualitas, dan uji tanak beras di Gudang Bulog Bondansari, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Beras harus bermutu medium dan beratnya 10 kg per karung. Uji tanak menilai aroma, warna nasi, tekstur, dan rasa. Pada Juli-September, 39.070 keluarga penerima manfaat ber-KTP Kota Pekalongan dari Desil 1-4 mendapat 10 kg beras per bulan (total 30 kg). Penyaluran langsung dimulai minggu akhir Agustus hingga awal September melalui kelurahan.

2) Demplot smart farming padi Biosalin
Kegiatan ini didukung BI Kantor Perwakilan Tegal. Kegiatan berupa penyemprotan pupuk dan pengendalian hama dengan drone. Padi ditanam dengan transplanter dan pada umur 48 HST anakannya mencapai 35.

3) Penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian
Wakil Wali Kota menyerahkan 2 unit combine harvester dan 6 unit pompa air kepada 8 kelompok tani di Aula Dinperpa. Bantuan ini mendukung target Luas Tambah Tanam padi 1.473 hektare pada 2026. Luas baku sawah sekitar 775 hektare, sehingga petani didorong menanam 2-3 kali setahun. Kelompok tani diminta mengelola alat bersama dan menyiapkan dana perawatan.

4) Pengembangan Biosalin di lahan terdampak rob
BI Kantor Perwakilan Tegal memverifikasi lapangan ke 3 kelompok tani di Pekalongan Utara (Poktan Degayu 1, Sipring, dan Cangkring) yang aktif kembali setelah sawahnya terkena rob. Lahan terdampak rob yang sudah bisa ditanami meluas menjadi 53 hektare. Bantuan sarana dari BI mempercepat olah lahan dan tanam serta menekan biaya produksi, dan pengajuan bantuan kelompok tani diharapkan disetujui.

5) Gerakan pengendalian wereng batang cokelat
Dilakukan di Poktan Subur Makmur, Kelurahan Sokoduwet, Pekalongan Selatan, bersama penyuluh Kementan. Kegiatan ini mengikuti rekomendasi petugas pengamat hama setelah populasi hama melebihi 70 ekor per rumpun di beberapa petak. Petani menerima bantuan pestisida untuk penyemprotan serempak, karena serangan dapat menurunkan kualitas dan kuantitas panen.

6) Gerakan pengendalian penggerek batang padi
Dilakukan di Poktan Gema Tani, Kelurahan Gamer, Pekalongan Timur. Serangan sudah melampaui ambang batas pengendalian dan sempat menurunkan produksi padi dalam

beberapa musim terakhir. Petani mendapat edukasi dan bantuan pestisida untuk diaplikasikan serentak.

7) Pemberian Benih Ikan Nila

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan membagikan benih ikan nila secara cuma-cuma kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan menstimulasi kegiatan budidaya, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, serta menjaga ketersediaan dan harga ikan nila. Pada Triwulan I Tahun 2026, benih yang disalurkan kepada masyarakat berjumlah 74.700 ekor dengan ukuran 2-5 cm.

8) Pendataan dan Pembinaan Usaha Cold Storage

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan melakukan pendataan dan pembinaan terhadap usaha cold storage di Kota Pekalongan. Keberadaan cold storage membantu menjaga stabilitas harga ikan karena pada saat hasil tangkapan melimpah, ikan dapat disimpan sehingga pasokan tetap tersedia dan harga tidak turun secara tajam. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 10 pemilik atau pengelola cold storage dengan total 12 unit dan kapasitas tampung keseluruhan 1.092 ton. Kapasitas terbesar dimiliki oleh CV Alaska Fish Indonesia dan PT Nelayan Samudra Jaya masing-masing 300 ton, diikuti oleh Koperasi Jasa Sukses Mina Bahari dan Tata Ringkas Mandiri masing-masing 130 ton, serta UD Eddi Hero 100 ton.

9) Pelayanan Pelelangan Ikan di TPI

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan menyelenggarakan pelayanan pelelangan ikan di TPI setiap hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu. Layanan ini memudahkan nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh ikan dengan harga yang lebih terjangkau.

3. Kelancaran Distribusi.

1) Pengamanan (pam) lalu lintas

- Car Free Day Kawasan Mataram. Dilakukan setiap Minggu pukul 06.00-10.00 WIB dengan 10 petugas (Juli 4 kali, Agustus 5 kali, September 4 kali). Petugas menutup ruas jalan, mengatur arus, dan mengatur parkir bersama Kepolisian, TNI, dan Satpol PP.
- Pam kegiatan Juli. Jalan Sehat Hari Anak Nasional (19 Juli, Jetayu, 20 petugas), Invinity Run (5 Juli, Stadion Hoegeng, 16 petugas), Pasar Murah dan Bakti Sosial Hari Koperasi (26 Juli, Lapangan Mataram, 10 petugas), dan Pengajian Umum (23 Juli, Masjid Al-Ikhlas, 10 petugas).
- Pam rangkaian HUT RI ke-81 (Agustus). Mencakup tirakatan dan pengukuhan Paskibra (15 Agustus), apel kehormatan dan renungan suci (16 Agustus, malam hingga dini hari), upacara pengibaran bendera, serenada, dan penurunan bendera (17 Agustus), serta tasyakuran dan resepsi (19 Agustus). Jumlah petugas 5-10 orang per kegiatan.
- Pam rangkaian Maulid Nabi (September). Kirab Merah Putih (18 September, 20 petugas, rute Desa Masin ke Alun-Alun), Haflah Dzikro (18 September, 5 petugas), Pawai Pajang Jimat (19 September, 19 petugas, Stadion Hoegeng ke Kanzus Sholawat), dan puncak Maulid (20 September, 12 petugas). Titik-titik persimpangan dijaga agar tidak macet saat rombongan melintas.

2) Pengawasan dan pengendalian (wasdal)

Dilakukan 14 hari per bulan (total 42 hari), pukul 16.00-20.00 WIB, dengan 6 petugas.

Lokasinya kawasan Alun-Alun, Sorogenen, Jl. Dr. Cipto, Jl. Nusantara, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Hasanudin, dan Jl. Sultan Agung. Petugas mengurai kemacetan, mengimbau pengendara dan juru parkir, dan menempelkan stiker pelanggaran pada kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir.

3) Fasilitasi perlintasan sebidang kereta api

- 14 Juli: Perbaikan palang yang rusak karena tertabrak kendaraan, meliputi pemeriksaan palang, tiang, dan mekanisme penggerak, penyesuaian posisi, serta pemeriksaan ulang fungsi.
- 10 Agustus: Perbaikan dan pemeliharaan palang, mencakup penguatan konstruksi, perbaikan mekanisme penggerak, dan pengujian gerak naik-turun palang.
- 6 September: Monitoring oleh PT KAI di Pos Jaga Perlintasan Dekoro, untuk menilai kesiapan petugas, kelengkapan sarana, dan kepatuhan pada prosedur keselamatan.

4) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL/ATCS)

a. Pemeliharaan lampu lalu lintas (Juli)

- TL Pusri (2 Juli): Memangkas ranting yang menutupi lampu aspek, mengganti lampu kuning yang redup, dan mengganti sekring.
- TL Tirto (3 Juli): Memperbaiki pondasi tiang yang miring dan membersihkan kamera PTZ.
- Simpang Gambaran (5 Juli): Membersihkan perangkat mesin kontrol.
- TL Polsek Timur (6 Juli): Mengganti relay DC karena peralihan otomatis ke aki tidak berfungsi.
- TL Sorogenen (7 Juli): Mengganti lampu LED dan relay AC.
- TL Alun-alun (24 Juli): Menggeser lampu reklame yang menyilaukan kamera dan memasang water barrier.

b. Pemeliharaan (Agustus)

- TL Setono (3 Agustus): Melepas spanduk yang menempel pada tiang.
- TL Ahmad Yani (5 Agustus): Memperbaiki lampu aspek yang miring.
- TL Posis (16 Agustus): Memasang kabel ulang agar saat banjir lampu kaki barat tetap bisa diatur lewat ATCS.
- TL Grogolan (20 Agustus): Mengganti relay box kontrol penyebab blackout saat listrik padam.
- TL Dharma Bakti (21 Agustus): Mengganti PSU 24 V dan mengatur ulang kamera PTZ. Terminal server belum terhubung ke CC Room dan penyebabnya belum ditemukan.
- TL Ponolawen (23 Agustus): Menggeser lampu reklame dan memasang water barrier.

c. Pemeliharaan dan evaluasi durasi lampu (September)

- CC Room (5 September): Memperbarui webserver, mencadangkan data, memasang lampu sorot, dan menyeragamkan IP dan password kamera.
- Simpang Terminal, Setono, Ahmad Yani, Posis, dan Grogolan (6, 7, 12, 19, 20 September): Melakukan penghitungan arus (counting) untuk mengevaluasi durasi lampu, lalu mengganti fasa.
- Di setiap lokasi, debu pada perangkat mesin kontrol dibersihkan untuk mencegah korsleting.
- Operasional ATCS
- Sebanyak 16 simpang dipantau CCTV. Arus meningkat pada 15-17 dan 22-25 Agustus karena libur panjang, sedangkan Juli dan September tidak ada peningkatan signifikan. Jalur pantura masih didominasi truk, dan keterangan foto dokumentasi menyebut pantura terpantau lancar atau ramai lancar.

5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pemeliharaan lampu flashing (warning light). Targetnya 2 unit pada triwulan berjalan dan tercapai 2 unit. Lokasinya Juli (Seruni, Tirto, Simpang Dr. Wahidin, Kenanga, Manggis), Agustus (Truntum, Letjen Suprapto, Simpang Pasar Anyar, Stimik), dan September (Urip Sumoharjo depan Pom Kintong dan depan Masjid Jami Asy-Syarif, Wr. Supratman, Perintis Kemerdekaan, Simpang Patriot). Dengan hitungan saya, itu 14 titik. Tujuannya mencegah kerusakan tak terduga dan memperpanjang usia komponen.

6) Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan serta drainase

a. Selesai (100%)

• Rehabilitasi decker Jl. Sumatra, Bendan Kergon, Pekalongan Barat (Rp124,9 juta). Pekerjaannya galian, pemasangan box culvert, pasangan batu, dan lapis pondasi atas.

• Rehabilitasi saluran pematus Jl. Otto Iskandar di Nata, Kalibaros, Pekalongan Selatan (Rp270 juta). Pekerjaannya galian, pemasangan U-ditch, dan pengaspalan.

b. Sedang berjalan

• Rehabilitasi saluran pematus Jl. Cendrawasih, Kandang Panjang (Rp392,8 juta), progres 7,04% (tahap galian tanah).

c. Pre Construction Meeting (progres 0%)

• Rehabilitasi Jl. Ampera (Rp225,3 juta), Jl. HOS Cokroaminoto (Rp364,6 juta), dan Jl. KH. Syafi'i (Rp92,5 juta), semuanya di Pekalongan Selatan.

• Rekonstruksi Jl. H. Agus Salim, Kauman, Pekalongan Timur (Rp902,4 juta).

d. Masih proses pengadaan (nilai kontrak belum ada)

• Saluran pematus Jl. Ki Surontoko (Setono) dan Jl. Majapahit (Podosugih), serta drainase Jl. Wr. Supratman (Panjang Baru).

• Rehabilitasi Jl. Pelita I (Buaran Kradenan).

Rekonstruksi Jl. H. Mochamad Chaeron (Banyurip), Jl. Labuan I dan III (Degayu), Jl. Samudra (Kandang Panjang), Jl. Selat Karimata (Bandengan), Jl. Sriwedari (Poncol), dan Jl. Teuku Umar (Pasir Kraton Kramat).

4. Komunikasi yang Efektif.

1) Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri

TPID Kota Pekalongan, yang beranggotakan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secara rutin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri. Rapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dengan frekuensi satu kali dalam seminggu, mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat tersebut, TPID Kota Pekalongan turut membahas perkembangan kondisi serta permasalahan yang berkaitan dengan inflasi di Kota Pekalongan. Kegiatan ini memperkuat koordinasi antar-OPD dan menyelaraskan langkah pengendalian inflasi di tingkat daerah dengan arah kebijakan nasional.

2) Publikasi Harga Kebutuhan Pokok melalui Website Sipokmas dan Instagram

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop dan UKM) Kota Pekalongan mempublikasikan informasi harga kebutuhan pokok melalui website Sipokmas dan akun Instagram yang dikelola oleh Dindagkop dan UKM. Informasi tersebut diperbarui berdasarkan hasil pemantauan harga harian di pasar-pasar di Kota Pekalongan, sehingga masyarakat dapat mengakses data harga yang aktual dan transparan. Publikasi ini diharapkan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan berbelanja serta menjaga ekspektasi masyarakat

terhadap perkembangan harga.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1. Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kota Pekalongan dan koordinasi dengan dengan TPID Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di Kota Pekalongan.
    2. Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus devisit pangan di masing-masing daerah.
    3. Pentingnya adaptasi kebijakan dan aksi untuk menghadapi situasi yang tidak terduga.
    4. Perlu melakukan kerja sama dengan daerah lain untuk menajaga kestabilan harga dan pasokan pahan pangan.
    5. Perlunya memperkuat sinergi dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian inflasi di Kota Pekalongan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    1) Memperkuat kerja sama antardaerah dengan daerah pemasok
    Karena Pekalongan bukan daerah penghasil, kunci stabilitas pasokan ada di luar batas kota. Pemkot perlu menjalin kerja sama yang lebih konkret dengan daerah pemasok, terutama kabupaten tetangga dan sentra hortikultura serta beras di sekitar wilayah, dalam bentuk kesepakatan pasokan, pertukaran informasi stok dan panen, dan penghubungan langsung antara petani atau kelompok tani dengan pedagang atau pelaku usaha di kota. Forum TPID eks-Karesidenan Pekalongan yang difasilitasi Bank Indonesia menjadi wadah yang sudah ada dan bisa dimanfaatkan lebih aktif. Kerja sama ini menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus memperpendek rantai distribusi sehingga margin yang membebani harga di tingkat konsumen dapat ditekan.

    2) Menjalankan stabilisasi pasokan dan harga secara terjadwal, antisipatif, dan tepat sasaran
    Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar sudah menjadi instrumen yang dikenal warga, tetapi manfaatnya akan lebih besar jika dijalankan berdasarkan kalender risiko, bukan sekadar reaktif. Kegiatan sebaiknya dipercepat sebelum periode yang biasanya menaikkan permintaan, seperti hari besar keagamaan dan akhir tahun, serta pada masa pasokan menipis akibat kemarau atau musim hujan. Sasaran dan lokasinya perlu dipilih berdasarkan data, yaitu kelurahan dengan kelompok rentan dan pasar yang harganya paling cepat naik, supaya jumlah paket yang terbatas berdampak optimal. Pemkot juga perlu menjaga cadangan pangan daerah dan bekerja sama dengan Bulog agar stok beras dan komoditas penyangga siap dikeluarkan saat dibutuhkan. Efek langsung operasi pasar terhadap inflasi memang terbatas, tetapi ia meredam ekspektasi kenaikan harga dan melindungi daya beli kelompok yang paling terdampak.

    3) Mengoptimalkan produksi pangan lokal sesuai karakter kota
    Dengan lahan yang terbatas, strategi yang realistis bukan memenuhi seluruh kebutuhan dari produksi sendiri, melainkan mengurangi ketergantungan pada komoditas yang paling mudah

bergejolak. Pemkot dapat mendorong pemanfaatan pekarangan, lahan kosong, dan fasilitas umum untuk menanam cabai, sayuran, dan bumbu dapur dengan melibatkan kelompok wanita tani, PKK, dan komunitas kelurahan. Potensi pesisir dapat dimanfaatkan lewat penguatan perikanan dan peternakan skala kecil, seperti ikan dan unggas, sebagai sumber protein lokal. Untuk lahan sawah yang tersisa, upaya perlindungan dari alih fungsi dan adaptasi terhadap banjir dan rob, misalnya penggunaan varietas yang lebih tahan, patut dilanjutkan. Dampaknya terhadap inflasi bersifat penyangga di tingkat rumah tangga, tetapi cukup berarti saat harga komoditas tertentu melonjak.

4) Memitigasi risiko cuaca dan menjaga kelancaran distribusi

Kemarau dan musim hujan sama-sama berpotensi mengganggu pasokan, jadi antisipasinya perlu direncanakan sejak awal. Pemkot dapat menyusun kalender risiko musiman yang memetakan periode pasokan rawan, memantau perkiraan cuaca, dan menyiapkan langkah antisipasi sebelum musim hujan datang. Karena kota ini rawan banjir dan rob, perlu dipetakan jalur dan titik distribusi yang rentan, termasuk pasar dan gudang, serta disiapkan jalur alternatif dan stok penyangga di lokasi yang aman. Koordinasi dengan pengelola pasar, distributor, dan pelaku logistik juga penting agar distribusi tidak terputus ketika terjadi gangguan.

5) Melakukan komunikasi publik yang efektif

Inflasi sangat dipengaruhi ekspektasi, karena kabar kelangkaan atau kenaikan harga bisa memicu pembelian berlebihan yang justru mendorong harga lebih tinggi. Pemkot dan TPID perlu rutin menyampaikan informasi harga dan ketersediaan stok yang jelas kepada masyarakat, mengajak warga berbelanja secukupnya, dan meluruskan informasi yang menyesatkan.